

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstelasi sejarah Indonesia pada pertengahan abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari dinamika ketegangan ideologis Perang Dingin yang membagi dunia ke dalam dua kutub utama. Sebagai negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia menempati posisi strategis yang diperebutkan oleh Blok Barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat serta Blok Timur di bawah pengaruh Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Kedudukan tersebut menempatkan Indonesia bukan sekadar sebagai objek kepentingan global, melainkan sebagai subjek aktif yang berupaya merumuskan identitas politiknya secara mandiri di tengah ancaman neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim).¹

Eksperimen politik Presiden Soekarno melalui sistem Demokrasi Terpimpin, yang diinisiasi melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, merupakan upaya ambisius untuk mengintegrasikan elemen bangsa yang fragmentaris ke dalam payung ideologis Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).² Soekarno, dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Besar Revolusi, memandang fusi tersebut sebagai prasyarat mutlak persatuan nasional guna menghadapi ancaman eksternal. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru memicu polarisasi politik domestik yang tajam, terutama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).³

Pada periode 1959 hingga 1965, PKI bertransformasi menjadi partai komunis nonpemerintah terbesar di dunia dengan basis massa mencapai jutaan orang melalui berbagai organisasi sayap, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), SOBSI, dan Gerwani.⁴ Keberhasilan PKI pada Pemilu 1955, yang menempatkan

¹ Hati, L. P., & Ginting, L. D. C. U. (2022). Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia. Yupa: Historical Studies Journal, 6(2), h.162

² *Ibid*, h.166

³ *Ibid*, h.166

⁴ Martijn Eickhoff, dkk., 1965 pada Masa Kini: Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal, terj. Muhamad Dimas Aldio, dkk. (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2019), hlm.142-143

partai ini pada posisi empat besar, memberikan legitimasi politik yang kuat untuk menyuarkan isu-isu kerakyatan secara agresif, termasuk reforma agraria dan aksi sepihak di wilayah pedesaan.⁵ Di sisi lain, TNI-AD memandang kebangkitan PKI sebagai ancaman eksistensial terhadap doktrin negara dan kepentingan institusional militer. Usulan pembentukan 'Angkatan Kelima' yang dipersenjatai oleh buruh dan tani—dengan dukungan Tiongkok—menjadi titik kulminasi perseteruan antara pimpinan militer dan kelompok kiri.⁶ Ketegangan ini diperburuk oleh krisis ekonomi nasional yang ditandai dengan hiperinflasi, kelangkaan komoditas pokok, dan akumulasi utang luar negeri yang memicu keresahan sosial luas. Dalam konstelasi internasional, keterlibatan aktif badan intelijen asing seperti CIA dan MI6 menunjukkan bahwa peristiwa 1965 bukan sekadar fenomena domestik, melainkan manifestasi dari *proxy war* global dalam mencari keseimbangan kekuatan baru di Asia Tenggara.⁷

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965, yang berujung pada penculikan serta pembunuhan enam jenderal dan satu perwira pertama TNI-AD, menjadi katalisator bagi transformasi radikal dalam lintasan sejarah Indonesia. Dalam durasi yang sangat singkat, narasi resmi mulai dikonstruksi oleh militer di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Narasi tersebut mengidentifikasi PKI sebagai aktor intelektual tunggal di balik upaya kudeta tersebut, yang kemudian memicu pergeseran peta kekuatan politik nasional secara fundamental.

Konstruksi narasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses yang sangat terstruktur dan sistematis melalui apa yang disebut sebagai historiografi resmi Orde Baru. Nugroho Notosusanto, sebagai arsitek utama sejarah versi pemerintah, memainkan peran sentral dalam menyusun kurikulum pendidikan, buku teks sejarah, dan monumen-monumen peringatan yang secara konsisten memposisikan PKI sebagai pengkhianat bangsa yang kejam. Selama lebih dari tiga dekade, narasi tunggal ini dibakukan dan dilindungi oleh kekuasaan

⁵ Mortimer, R., & Santosa, Y. (2011). Indonesian communism under sukarso ideologi dan politik 1959-1965. Pustaka Pelajar.

⁶ Sucipto, Dwi, 2013 Kontroversi G 30 S. Jakarta Selatan: Palapa. Hlm.112

⁷ Soedarmo, U. R., & Muslimin, R. S. (2019). Peranan Sjam Kamaruzzaman Dalam Gerakan 30 September Tahun 1965. Jurnal Artefak, 2(1). Hlm.75

negara yang represif, sehingga menutup rapat setiap ruang bagi interpretasi alternatif atau suara dari para penyintas dan korban.⁸

Dominasi historiografi Orde Baru tidak hanya berfungsi untuk mencatat masa lalu, tetapi lebih sebagai instrumen legitimasi politik bagi rezim militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Sejarah ditransformasikan menjadi alat ideologis yang menanamkan ketakutan kolektif terhadap ancaman komunisme, sebuah fenomena yang kemudian dikenal sebagai "bahaya laten". Segala bentuk keberpihakan terhadap gagasan progresif atau kritik terhadap militer seringkali dicap sebagai simpatisan komunis, yang berujung pada stigma sosial dan diskriminasi hukum bagi jutaan orang beserta keluarga mereka. Historiografi periode ini secara sengaja menghapus jejak-jejak kekerasan massal dan pembantaian ratusan ribu orang yang mengikuti peristiwa G30S, dengan mengalihkannya sebagai "kemarahan rakyat" yang spontan dan tak terkendali. Akibatnya, memori kolektif bangsa Indonesia dibentuk dalam sebuah vakum informasi di mana hanya ada satu versi kebenaran yang diperbolehkan eksis, menciptakan tantangan luar biasa bagi upaya pelurusan sejarah di masa depan.⁹

Kompleksitas masalah ini semakin nyata ketika kita mempertimbangkan bahwa peristiwa 1965 melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling tumpang tindih, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Narasi yang hanya menunjuk satu dalang tunggal terbukti tidak memadai untuk menjelaskan kerumitan peristiwa tersebut secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan historiografi yang lebih kritis dan pluralistik untuk membongkar bias-bias ideologis yang telah mengakar selama puluhan tahun. Peran para ilmuwan asing atau Indonesianis menjadi sangat krusial dalam konteks ini, karena mereka seringkali memiliki akses terhadap arsip-arsip internasional dan kemandirian intelektual yang sulit dicapai oleh peneliti domestik selama masa represi.¹⁰ Karya-karya Indonesianis menawarkan perspektif "orang luar" yang mampu melihat

⁸ Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di Indonesia masa orde baru hingga reformasi. *Efektor*, 4(2), hal. 39

⁹ *Ibid*, hlm.39

¹⁰ Amin, S., & Murtaufiq, S. (2017). Mengamati Indonesianis: Dari Antropologi Budaya, Politik Kolonial Hingga Hegemoni Dan Pengendalian Wacana Modern. *Mozaic: Islam Nusantara*, 3(1), hal. 54-55

keterkaitan antara kekerasan di tingkat akar rumput dengan dinamika politik elite di Jakarta serta keterlibatan negara-negara besar dalam mendukung pembersihan elemen kiri di Indonesia. Dengan meninjau kembali historiografi Indonesianis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih jernih mengenai bagaimana sejarah 1965 dikonstruksi, diperdebatkan, dan akhirnya dimaknai ulang dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan yang lebih substantif.¹¹

Karena mereka telah membangun tradisi historiografi kritis saat peristiwa-peristiwa tersebut masih berlangsung, para ahli Indonesia telah memainkan peran penting dalam upaya untuk mengikis narasi tunggal Orde Baru. *Cornell Paper*, yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey pada tahun 1966 dan dipublikasikan secara luas pada tahun 1971, merupakan salah satu publikasi tertua dan paling kontroversial.¹² Kesimpulan utama studi tersebut membalikkan sejarah resmi dengan mengemukakan teori bahwa Gerakan 30 September (G30S) adalah pergolakan internal di dalam TNI sendiri, di mana sekelompok perwira menengah yang progresif berusaha menyingkirkan para jenderal yang mereka anggap korup dan pro-Barat. Menurut Anderson dan McVey, Sukarno dan PKI hanyalah korban yang terseret ke dalam pusaran konflik tersebut. Karena keterbatasan sumber primer pada masa itu dan kecenderungan untuk meremehkan peran kelompok PKI yang, pada kenyataannya, bekerja sama dengan para perwira tersebut (sebagaimana akhirnya terungkap dalam penyelidikan John Roosa puluhan tahun kemudian) studi ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang spekulatif.¹³

"The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966" adalah buku karya Robert Cribb, seorang sejarawan yang mengkaji peristiwa pembantaian massal terhadap anggota atau simpatisan PKI pada tahun 1965-1966

¹¹ Adam, A. W. (2018). Beberapa catatan tentang historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, (95), hlm.28

¹² Anderson, Benedict R.; McVey, Ruth T. (1971). *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*. Interim Reports Series. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project.

¹³ Adam, A. W. (2018). Beberapa catatan tentang historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, (95), hlm.15

di Jawa dan Bali, yang menyatukan data dan menganalisis pentingnya peristiwa tersebut dalam sejarah Indonesia modern.¹⁴

Lalu ada John Roosa dengan 3 karya nya yang monumental yaitu “*Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*¹⁵, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*¹⁶ dan *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*¹⁷” yang dimana ketiga karyanya fokus pada peristiwa pembantaian massal 1965.

Yang tak kalah populer yaitu “*The Jakarta Method*” adalah buku sejarah-politik yang ditulis oleh Vincen Bevins, seorang jurnalis Amerika Serikat. Buku ini membahas dukungan pemerintah federal Amerika Serikat terhadap pembantaian anti-komunis di seluruh dunia serta konsekuensi dari masa Perang Dingin hingga saat ini. Judul buku mengingatkan pada Pembantaian di Indonesia 1965–1966 ketika diperkirakan satu juta orang dibunuh dalam upaya untuk menghancurkan gerakan politik sayap kiri di Indonesia. Replikasi strategi pembunuhan massal dan reformasi perekonomian yang terjadi di Amerika Latin, Asia, dan area lain dikenal sebagai Metode Jakarta. Sebagian besar orang percaya bahwa pembantaian yang dilakukan oleh militer Indonesia yang didukung Amerika Serikat di Indonesia sangat berhasil dalam menghancurkan politik konservatif dan liberalisasi ekonomi, dan istilah "Jakarta" telah digunakan untuk menggambarkan kebijakan serupa di negara-negara lain yang didukung Amerika Serikat.¹⁸

Kontribusi utama penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah penguatan fondasi bagi historiografi kritis di Indonesia. Dengan membedah secara mendalam kontestasi narasi antara versi resmi pemerintah dan temuan-temuan Indonesianis,

¹⁴ Cribb, Robert (ed.). *The Indonesian killings 1965-1966: studies from Java and Bali*. Clayton, Vic: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.

¹⁵ Roosa, J. (2008). *Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.

¹⁶ Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). *Tahun yang tak pernah berakhir: memahami pengalaman korban 65, esai-esai sejarah lisan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

¹⁷ Roosa, J. (2020). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press.

¹⁸ Bevins, V. (2021). *The Jakarta Method : Washington's anticommunist crusade & the mass murder program that shaped our world* . New York: Public Affairs.

penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai peran sejarah sebagai alat kekuasaan sekaligus alat pembebasan.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka kerja baru untuk memahami bagaimana memori kolektif dapat dimanipulasi melalui struktur pendidikan dan media, serta bagaimana memori tersebut dapat dipulihkan melalui penggunaan arsip-arsip primer yang selama ini disembunyikan. Hal ini tidak hanya relevan bagi studi sejarah Indonesia, tetapi juga bagi studi sosiologi, ilmu politik, dan hukum internasional, terutama dalam hal pemahaman mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan proses truth-seeking di negara-negara pasca-otoritarian.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat pembahasan penelitian lebih jelas dan sistematis, penulis membuat rumusan masalah berikut berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, seperti:

1. Bagaimana latar belakang para Indonesianis memiliki ketertarikan terhadap kajian peristiwa 1965?
2. Bagaimana pandangan para Indonesianis terhadap peristiwa 1965?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang para Indonesianis memiliki ketertarikan terhadap kajian peristiwa 1965
2. Untuk mengetahui pandangan para Indonesianis terhadap peristiwa 1965

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memetakan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Melalui analisis terhadap langkah-langkah dan temuan peneliti sebelumnya, diperoleh gambaran mengenai metodologi serta capaian ilmiah yang telah ada. Berikut adalah beberapa literatur yang mengkaji peran Indonesianis serta konstelasi politik masa Orde Baru:

Pertama, laporan khusus majalah *Tempo* edisi 14-20 November 2021 berjudul "Republik di Mata Indonesianis: Pasang-surut peran peneliti asing dalam sejarah

Indonesia". Liputan ini mendalami dinamika peran peneliti asing (Indonesianis) melalui penelusuran lapangan dan wawancara mendalam. Literatur ini berfungsi sebagai sumber pendukung dan bahan komparasi mengenai perspektif eksternal terhadap sejarah Indonesia.

Kedua, buku berjudul *1965 Pada Masa Kini: Hidup dengan Warisan Peristiwa Pembantaian Massal* terbitan Universitas Sanata Dharma Press. Karya ini merupakan kompilasi pemikiran sejarawan, aktivis HAM, dan Indonesianis mengenai dampak berkelanjutan peristiwa 1965. Teks ini merupakan terjemahan dari *Journal of Genocide Research* (2017) yang memberikan landasan kritis mengenai memori kolektif pasca-konflik.

Ketiga, artikel jurnal karya Asvi Warman Adam yang berjudul "Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965". Artikel ini memaparkan poin-poin krusial terkait perkembangan penulisan sejarah peristiwa 1965 dan pergeseran narasi yang terjadi di dalamnya.

Keempat, buku karya Wijaya Herlambang berjudul *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Penelitian ini membedah upaya rezim Orde Baru dalam menggunakan produk budaya untuk melegitimasi kekerasan tahun 1965–1966. Herlambang menyajikan bukti empiris mengenai keterlibatan aktor internasional dan elit budaya domestik dalam mengonstruksi diskursus antikomonisme, serta bagaimana gerakan budaya kontemporer mencoba mendekonstruksi warisan tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai kerangka kerja ilmiah. Louis Gottschalk (1986)¹⁹ mendefinisikan metode sejarah sebagai proses pengujian dan penganalisisan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Dalam upaya merekonstruksi sejarah secara sistematis dan objektif, penelitian ini mengikuti empat tahapan prosedur operasional, yaitu:

1. Heuristik (pengumpulan sumber),
2. Kritik (verifikasi keaslian dan kredibilitas sumber),

¹⁹ Louis Gottschalk, (1985) *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, h. 18

3. Interpretasi (pemberian makna atau sintesis fakta), dan
4. Historiografi (penulisan sejarah).

1. Heuristik

Kata “heuristik” berasal dari kata Yunani “heuristikum,” yang berarti menemukan atau mengumpulkan, sebagaimana tersirat dalam namanya. Heuristik adalah sebuah metode, sebuah seni, dan bukan ilmu pengetahuan, menurut C. J. Reiner (dikutip oleh Dudung Abdurrahman).²⁰ Proses memperoleh sumber-sumber tekstual, baik dari arsip, catatan, wawancara, atau temuan penelitian yang akan datang, dikenal sebagai heuristik. Dalam hal buku cetak, heuristik sejarah pada dasarnya sama dengan kegiatan bibliografi lainnya. Namun, sejarawan harus menggunakan banyak informasi yang tidak ditemukan dalam buku. Dokumen-dokumen ini harus dicari di arsip, pengadilan, perpustakaan pemerintah, catatan, dan sumber-sumber lain jika merupakan dokumen resmi.²¹

Heuristik dibagi menjadi tiga tahap: eksplorasi, identifikasi, dan klasifikasi. Proses memperoleh informasi dengan mencari literatur yang relevan terkait topik ini dikenal sebagai tinjauan pustaka. Untuk menemukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian penulis, dilakukan tinjauan pustaka. Penulis mengidentifikasi sumber-sumber berikut:

a. Sumber Primer

1) Sumber Tertulis

a) Buku

1. Anderson, B. R., & McVey, R. T. (1971). *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Cornell University Press.
2. Anderson, B. R. O'G. (1987). How did the generals die? *Indonesia*, 43, 109–134. Cornell University
3. Hill, D. T. (1994). *The Press in New Order Indonesia*. Nedlands, W.A.: University of Western Australia Press in association with Asia Research Centre on

²⁰Dudung Abdurrahman, (2011) *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, h. 101.

²¹ Louis Gottschalk, (1985) *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, h. 32

Social, Political and Economic Change, Murdoch University.

4. Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
5. Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
6. Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
7. Roosa, J. (2020). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press.
8. Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). *Tahun yang tak pernah berakhir: memahami pengalaman korban 65, esai-esai sejarah lisan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
9. Lane, M. (2008). *Unfinished nation: Indonesia before and after Suharto*. Verso.
10. Cribb, Robert (ed.). *The Indonesian killings 1965-1966: studies from Java and Bali*. Clayton, Vic: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
11. Bevins, V. (2021). *The Jakarta Method : Washington's anticommunist crusade & the mass murder program that shaped our world*. New York: Public Affairs.
12. Robinson, G. B. (2018). *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*. Princeton University Press.

b) Majalah

1. Majalah Tempo. (2011). Republik di Mata Indonesianis. Edisi 14-20.
2. Majalah Tempo. (2012). Liputan Khusus: Pengakuan Algojo 1965. Edisi 1-7 Oktober.

b. Sumber Sekunder

1) Sumber Tertulis

a) Buku

1. Herlambang, W. (2013). Kekerasan budaya pasca 1965: Bagaimana Orde Baru melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film. Marjin Kiri.

b) Jurnal

1. Amin, S., & Murtaufiq, S. (2017). Mengamati Indonesianis: Dari Antropologi Budaya, Politik Kolonial Hingga Hegemoni Dan Pengendalian Wacana Modern. *Mozaic: Islam Nusantara*, 3(1), hal. 54-55
2. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Indonesianis Sebagai Agen Soft Power: Upaya Pemanfaatannya Bagi Diplomasi Indonesia. KEMLU RI.
3. Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan historiografi buku teks sejarah di indonesia masa orde baru hingga reformasi. *Efektor*, 4(2), 36-43.

c) Majalah

1. Majalah Tempo. (2012). Pengakuan Algojo 1965. Edisi 1-7 Oktober.

2. Kritik

Kritik sumber merupakan tahapan evaluasi kritis terhadap seluruh data historis yang telah dihimpun guna menguji validitas dan otentisitasnya. Pada fase ini, peneliti melakukan verifikasi mendalam untuk membedakan antara sumber primer (asli) dan sumber sekunder (turunan), serta menilai relevansi data terhadap objek studi. Tujuan fundamental dari prosedur ini adalah mengeliminasi bias dan memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas eksponensial. Melalui seleksi yang ketat, kritik sumber diproyeksikan untuk menghasilkan fakta sejarah yang otoritatif, bersifat *unfabricated* (murni), serta memiliki reliabilitas tinggi yang didukung oleh kesaksian (*eyewitness*) yang valid.²² Kritik sumber ini dibedakan menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Dalam kritik ekstern, peneliti mengevaluasi apakah suatu sumber merupakan dokumen yang asli dan belum mengalami perubahan, pemalsuan, atau manipulasi isi. Hal ini mencakup penilaian terhadap bentuk fisik, waktu penerbitan, dan otoritas penerbit sumber tersebut. Sumber dianggap otentik jika dapat dipastikan berasal dari masa dan pihak yang tepat sesuai dengan konteks kajian. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan beberapa dokumen penting yang telah di verifikasi otentisitasnya, di antaranya:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan proses penting dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk memastikan keaslian, validitas, dan tingkat akurasi sumber-sumber yang digunakan. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek fisik maupun konteks historis dari suatu dokumen, seperti tanggal penerbitan, jenis tinta, bahan kertas, serta kondisi sosial-budaya saat sumber tersebut dibuat, guna menentukan apakah dokumen itu asli, salinan, atau hanya reproduksi. Untuk menguji keotentikannya, peneliti mempertimbangkan lima aspek utama, yaitu waktu pembuatan dokumen dengan menetapkan batas awal (*terminus post quem*) dan batas akhir (*terminus ante quem*) untuk kemudian dibandingkan dengan konteks zamannya; lokasi pembuatan yang dapat memperkuat keyakinan akan

²² Suhartono W. Pranoto. (2023), *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 36.

keaslian karena tempat asal sering kali berbeda dengan lokasi penyimpanan; identitas pembuat yang ditelusuri melalui latar belakang, karakter, hingga bukti fisik seperti tulisan tangan atau tanda tangan; bahan atau material penyusun yang dianalisis untuk melihat kesesuaian dengan periode sejarah, misalnya jenis kertas atau teknologi penulisan yang digunakan pada masa tertentu, serta kondisi fisik dokumen untuk memastikan bahwa sumber tersebut masih dalam bentuk aslinya dan belum mengalami perubahan atau pemalsuan. Keseluruhan langkah dalam kritik ekstern ini kemudian diterapkan secara sistematis dalam penelitian sebagai upaya memperoleh sumber sejarah yang autentik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³

Kritik ekstern berfungsi untuk menjawab tiga hal tentang:

1. Apakah sumber tersebut otentik atau tidak?
2. Apakah sumber asli atau turunan?
3. Apakah sumber tersebut tetap utuh atau telah mengalami perubahan?

Kritik ekstern juga digunakan untuk perbandingan antara sumber yang didapat dengan sumber-sumber lainnya yang sezaman.²⁴ Diantara kritik ekstern yang penulis lakukan adalah:

1) Sumber Tulisan

a) Buku

1. Anderson, B. R., & McVey, R. T. (1971). *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Cornell University Press. Kritik ekstern terhadap karya Anderson dan McVey (1971) menunjukkan bahwa dokumen ini memiliki autentisitas yang kuat sebagai produk riset akademis dari Cornell University, karena font terlihat masih menggunakan mesin tik, walaupun peneliti mendapatkannya berupa PDF. Meskipun demikian,

²³ M.Dien Majid dan Johan Wahyudi (2014), *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Depok: Pranada. H. 217

²⁴ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 224.

jika dilihat dari sifatnya, buku ini merupakan sumber primer karena berisi analisis mendalam atas berbagai data primer seperti siaran radio dan dokumen militer. Mengenai keutuhan teks, pembaca perlu memperhatikan bahwa narasi ini awalnya beredar sebagai draf rahasia pada tahun 1966 sebelum akhirnya resmi diterbitkan pada 1971. Perubahan ini menandakan adanya proses penyempurnaan argumen guna memastikan akurasi data yang tersedia, sehingga versi cetak 1971 merupakan versi final yang utuh.

2. Anderson, B. R. O'G. (1987). How did the generals die? *Indonesia*, 43, 109–134. Adalah sumber primer kedua dari Ben Anderson yang peneliti punya, masih dalam bentuk PDF dan karakteristik yang sama pula, yaitu font yang di ketik menggunakan mesin tik dan penjelasan yang menggunakan bahasa Indonesia masih ejaan lama seperti “penjiksaan” dan “matanja”.
3. Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing. Buku ini peneliti dapatkan website dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.
4. Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra. Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.

5. Roosa, J. (2020). Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia. University of Wisconsin Press. Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.
6. Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). Tahun yang tak pernah berakhir: memahami pengalaman korban 65, esai-esai sejarah lisan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.
7. Cribb, Robert (ed.). The Indonesian killings 1965-1966: studies from Java and Bali. Clayton, Vic: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990. Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.
8. Bevins, V. (2021). The Jakarta Method : Washington's anticommunist crusade & the mass murder program that shaped our world . New York: Public Affairs. Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.
9. Robinson, G. B. (2018). The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66.

Princeton University Press. Buku ini peneliti dapatkan dari website resmi yang diupload oleh penulisnya sendiri dan berbentuk PDF, otentisitas dari buku ini terlihat karena buku ini hasil scan.

10.

b) Majalah

1. Majalah Tempo. (2011). Republik di Mata Indonesianis. Edisi 14-20. Majalah ini peneliti dapat dari sebuah website penyedia e-book berupa PDF. Setelah peneliti tinjau majalah ini sangat lengkap dan ada tahun terbitnya, dan sudah di *crosscheck* di website resmi majalah Tempo sendiri.

b. Kritik Intern

Setelah otentisitas fisik sumber dipastikan melalui kritik eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik internal yang berfokus pada dimensi substansial atau aspek 'dalam' dari sebuah sumber. Tahapan ini menuntut peneliti untuk mengevaluasi kredibilitas testimoni pasca penetapan fakta kesaksian (*fact of testimony*). Peneliti harus melakukan penilaian kritis untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam sumber tersebut memiliki reliabilitas yang memadai atau justru mengandung bias yang dapat mendistorsi objektivitas penelitian.²⁵ Penulis melakukan kritik intern sebagai berikut:

1) Sumber Tertulis

a) Buku

1. Anderson, B. R., & McVey, R. T. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Cornell University Press. Kritik intern terhadap karya Anderson dan McVey (1971) menuntut evaluasi mendalam terhadap kredibilitas narasi "konflik internal Angkatan Darat" yang

²⁵ Sulasman. (2014). Metode Penelitian Sejarah . Bandung : Pustaka Setia. h.104.

mereka usung. Meskipun dokumen yang digunakan autentik secara fisik, peneliti harus mempertanyakan reliabilitas kesaksian yang menjadi fondasi argumen tersebut. Terdapat potensi bias interpretatif yang cukup kuat, di mana penulis cenderung meminimalisir peran PKI demi memperkuat tesis ketegangan antarfaksi militer. Sebagai laporan yang disusun jauh dari lokasi kejadian (Ithaca), kredibilitas testimoninya perlu diuji ulang: apakah informasi tersebut merupakan fakta objektif atau sekadar fragmen yang dipilih secara selektif untuk mendukung premis tertentu? Penilaian kritis ini krusial demi memastikan substansi sumber tidak terdistorsi oleh preferensi ideologis dalam merekonstruksi peristiwa 1965.

2. Anderson, B. R. O'G. (1987). How did the generals die? *Indonesia*, 43, 109–134. Dalam artikel "How Did the Generals Die?", Benedict Anderson melakukan kritik intern yang tajam terhadap narasi resmi pemerintah Orde Baru mengenai peristiwa G30S. Ia tidak sekadar menerima "fakta kesaksian" yang beredar, melainkan mengevaluasi kredibilitas substansial dari laporan autopsi para jenderal. Anderson menemukan diskrepansi mendalam: sementara narasi publik dipenuhi klaim penyiksaan sadis seperti pencungkilan mata, data medis autentik justru menunjukkan luka tembak sebagai penyebab utama tanpa bukti mutilasi. Penilaian kritis ini membuktikan adanya bias ideologis yang mendistorsi objektivitas sejarah demi legitimasi politik. Melalui pengujian reliabilitas sumber ini,

Anderson berhasil mengungkap bagaimana sebuah kesaksian formal dapat dimanipulasi, memaksa peneliti sejarah untuk melampaui permukaan dokumen guna menemukan kebenaran fungsional di baliknya.

3. Hill, D. T. (1994). *The Press in New Order Indonesia*. Nedlands, W.A.: University of Western Australia Press in association with Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University. Meskipun karya David T. Hill diakui sebagai rujukan otoritatif, peneliti wajib melakukan kritik intern terhadap kredibilitas testimoninya. Secara substansial, narasi Hill sangat dipengaruhi oleh perspektif akademisi Barat yang kental dengan nilai liberalisme pers. Peneliti harus mengevaluasi apakah pemilihan narasumber (yang didominasi elit jurnalis seperti dari Tempo) mampu merepresentasikan realitas pers Indonesia secara menyeluruh atau justru menciptakan bias elitis. Penilaian kritis diperlukan untuk membedakan antara fakta pengekangan media dengan interpretasi subjektif Hill mengenai "hegemoni budaya" negara. Tanpa menguji reliabilitas informasinya, objektivitas penelitian berisiko terdistorsi oleh kaca mata pengamat eksternal yang mungkin luput menangkap kompleksitas negosiasi aktor lokal di bawah tekanan rezim Orde Baru.
4. Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press. Dengan menggunakan kritik intern terhadap karya Edward Aspinall, *Opposing Suharto*,

para peneliti harus mengevaluasi keterangan para aktor gerakan pro-demokrasi yang menjadi dasar cerita ini. Meskipun sumber data primer sangat banyak, elemen penting informan, termasuk aktivis dan tokoh politik, dapat terpengaruh oleh subjektivitas penyintas, yang dapat mengubah peran lawan atau mengaburkan detail perjanjian politik untuk mempertahankan ideologi pasca-1998. Sangat penting untuk menilai kredibilitas informasi; peneliti perlu membedakan antara kesaksian asli dengan distorsi selektif memori manusia. Tanpa melakukan penilaian mendalam terhadap kejujuran internal sumber-sumber lisan tersebut, objektivitas penelitian berisiko terjebak dalam cerita satu sisi yang mengabaikan kenyataan pragmatis yang mendasari runtuhnya rezim Orde Baru.

5. Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing. Dalam mengkaji *The Army and Politics in Indonesia* karya Harold Crouch, kritik intern diperlukan untuk mengevaluasi kredibilitas testimoni para perwira. Peneliti wajib menguji apakah narasi faksionalisme militer di dalamnya benar-benar reliabel atau mengandung bias pembenaran diri aktor terkait peristiwa 1965. Evaluasi substansial ini penting guna memastikan informasi yang disajikan tidak terdistorsi oleh kepentingan personal informan, sehingga validitas fakta sejarah dalam dimensi "dalam" sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara objektif

6. Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra. Meskipun buku *Dalih Pembunuhan Massal* karya John Roosa menawarkan perspektif baru yang provokatif, peneliti perlu bersikap kritis terhadap kredibilitas testimoninya. Roosa sangat bergantung pada pengakuan Supardjo dan dokumen rahasia militer yang berpotensi mengandung bias subjektif atau distorsi kepentingan politik pada masa itu. Peneliti harus mengevaluasi apakah narasi "dokumen rahasia" tersebut benar-benar mencerminkan realitas lapangan atau sekadar pembelaan diri aktor sejarah, guna memastikan objektivitas penelitian tetap terjaga dari bias ideologis.
7. Roosa, J. (2020). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia*. University of Wisconsin Press. Dalam melakukan kritik intern terhadap buku *Buried Histories* karya John Roosa, peneliti wajib menguji kredibilitas narasi para penyintas melampaui sekadar autentisitas fisiknya. Meskipun kesaksian lisan memberikan detail substansial mengenai pembantaian 1965-1966, aspek "dalam" ini rentan terhadap distorsi ingatan traumatis atau bias subjektif. Peneliti harus mengevaluasi apakah testimoni tersebut merupakan fakta kesaksian yang reliabel atau justru terpengaruh oleh tekanan politik dekade-dekade sebelumnya yang dapat mengaburkan objektivitas sejarah.

8. Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). Tahun yang tak pernah berakhir: memahami pengalaman korban 65, esai-esai sejarah lisan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Dalam menelaah buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir, kritik intern sangat krusial untuk menguji kredibilitas narasi para penyintas. Peneliti harus mempertimbangkan apakah kesaksian lisan yang disampaikan puluhan tahun setelah peristiwa 1965 tetap reliabel atau telah terdistorsi oleh trauma dan memori kolektif. Evaluasi terhadap bias personal dan subjektivitas informan diperlukan guna memastikan bahwa fakta kesaksian dalam esai tersebut murni merepresentasikan realitas historis, bukan sekadar konstruksi emosional yang mengaburkan objektivitas sejarah.
9. Lane, M. (2008). *Unfinished nation: Indonesia before and after Suharto*. Verso. Meskipun Lane menyajikan narasi komprehensif mengenai gerakan akar rumput, kredibilitas testimoninya perlu diuji secara ketat. Sebagai pengamat yang memiliki kedekatan ideologis dengan gerakan kiri, narasi Lane berisiko mengandung bias subjektivitas yang mengagungkan peran massa rakyat secara tidak proporsional. Peneliti harus mengevaluasi apakah reliabilitas data faktualnya terdistorsi oleh sentimen anti-Suharto, yang berpotensi mengaburkan kompleksitas dinamika politik elit serta peran aktor-aktor non-progresif dalam proses transisi demokrasi Indonesia.

10. Cribb, Robert (ed.). *The Indonesian killings 1965-1966: studies from Java and Bali*. Clayton, Vic: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990. Dalam meninjau buku *The Indonesian Killings 1965-1966*, kritik intern harus difokuskan pada reliabilitas kesaksian para penyintas dan saksi mata. Mengingat trauma mendalam dan tekanan politik saat data dikumpulkan, peneliti wajib mempertimbangkan adanya bias memori atau ketakutan yang mendistorsi fakta. Evaluasi kritis diperlukan untuk memastikan apakah narasi kekerasan di Jawa dan Bali tersebut merupakan testimoni murni atau telah dipengaruhi oleh kepentingan subjektif, demi menjaga objektivitas historiografi terkait peristiwa tersebut.
11. Bevins, V. (2021). *The Jakarta Method : Washington's anticommunist crusade & the mass murder program that shaped our world*. New York: Public Affairs. Dalam menelaah buku *The Jakarta Method* karya Vincent Bevins, kritik intern dilakukan dengan menguji kredibilitas narasi kesaksian para penyintas pembantaian 1965. Peneliti harus membedakan antara fakta objektif dengan potensi bias personal atau trauma yang mungkin mendistorsi kronologi. Evaluasi ini krusial untuk memastikan apakah testimoni tersebut merupakan cerminan akurat dari strategi antikomunisme global atau sekadar fragmen ingatan yang subjektif, guna menjaga reliabilitas substansi sejarah di tengah narasi politik yang kompleks.

12. Robinson, G. B. (2018). *The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*. Secara intern, karya ini memiliki kredibilitas tinggi karena berhasil menyinkronkan data dokumen rahasia dengan realitas lapangan. Keberhasilan utamanya adalah membuktikan adanya intentionality (niat) dan agency (peran aktif) militer di tengah kekacauan politik, menjadikannya salah satu referensi paling otoritatif mengenai tragedi 1965.

b) Majalah

1. Majalah Tempo. (2012). *Pengakuan Algojo 1965*. Edisi 1-7 Oktober. Meskipun menyajikan data primer melalui wawancara langsung, narasi dalam edisi *Pengakuan Algojo 1965* menuntut kritik intern yang ketat. Peneliti harus mewaspadaai bias memori dan tendensi justifikasi diri dari para pelaku setelah puluhan tahun berlalu. Oleh karena itu, kredibilitas testimoni tersebut perlu diuji silang guna memastikan apakah informasi tersebut merupakan fakta historis atau sekadar konstruksi naratif pasca-peristiwa.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya dalam proses penelitian ini adalah tahapan interpretasi yaitu menyusun dan merangkai data yang telah diseleksi. Interpretasi atau penafsiran kerap dianggap sebagai sumber subjektivitas. Anggapan itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Benar karena tanpa kemampuan manfsirkan data sejarah tidak akan memiliki makna apapun. Sejarawan yang berintegritas akan selalu menunjukkan data serta asal-usulnya agar dapat diperiksa kembali oleh pihak lain, sehingga orang lainpun bisa melakukan penafsiran ulang. Karena itu, subjektivitas dalam penulisan sejarah diakui keberadaannya, namun tetap harus diminimalkan. Pada dasarnya interpretasi terdiri atas dua bentuk utama,

yaitu analisis dan sintesis.²⁶ Tahap interpretasi dalam penelitian sejarah merupakan proses penafsiran dan penghubungan data yang telah dikumpulkan dan diuji melalui tahap heuristik dan kritik.

Dinamika sejarah politik Indonesia selama periode Orde Baru yang berlangsung selama tiga dekade di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto bukan sekadar catatan peristiwa politik, melainkan sebuah medan tempur diskursif di mana kebenaran diproduksi, dipertahankan, dan dipaksakan. Upaya untuk membedah historiografi masa tersebut, terutama melalui kaca mata para pengkaji luar negeri atau Indonesianis, memerlukan sebuah instrumen analitis yang mampu menyingkap mekanisme di balik produksi pengetahuan sejarah yang sering kali bersifat hegemonik.

Michel Foucault, seorang filsuf dan sejarawan pemikiran asal Prancis, menawarkan kerangka konseptual melalui relasi kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*) yang memungkinkan peneliti sejarah untuk melampaui deskripsi faktual dan memasuki wilayah analisis mikro-fisika kekuasaan.²⁷ Dalam konteks penelitian historiografi terhadap literatur Indonesianis, teori Foucault menjadi sangat relevan karena mampu menjelaskan bagaimana narasi tentang politik Orde Baru dikonstruksi melalui institusi-institusi diskursif dan bagaimana narasi tandingan muncul sebagai bentuk resistensi intelektual.²⁸

Inti dari teori Foucault adalah tesis bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan; keduanya ibarat dua sisi dari satu koin logam yang saling memengaruhi dan membentuk. Kekuasaan bukan lagi dipahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau kelas elit secara negatif dan represif, melainkan sebagai sesuatu yang produktif dan tersebar di seluruh sendi kehidupan masyarakat.²⁹ Kekuasaan tidak hanya melarang atau membatasi, tetapi ia memproduksi realitas, memproduksi objek pengetahuan, dan memproduksi ritus-

²⁶ Kuntowijoyo, (2018) *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 78.

²⁷ Siregar, M. (2021). Kritik terhadap teori kekuasaan-pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1). H. 2

²⁸ Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1), h. 4

²⁹ Siregar, M. (2021). *Ibid.* H. 3

ritus kebenaran.³⁰ Pengetahuan, di sisi lain, tidak pernah bersifat netral atau murni karena ia selalu mengandung efek kuasa dan sebaliknya, setiap pelaksanaan kekuasaan menuntut adanya produksi pengetahuan sebagai basis legitimasi. Dalam pandangan Foucault, ilmu pengetahuan bersifat politis karena selalu berhubungan dengan relasi-relasi kuasa yang ada dalam masyarakat.³¹

Menggunakan teori Foucault sebagai "pisau bedah" dalam penelitian sejarah politik Orde Baru memberikan kedalaman analisis yang tidak dapat dicapai oleh pendekatan sejarah konvensional yang hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa besar. Teori ini menyadarkan peneliti bahwa relasi kekuasaan teranyam di setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan negara hingga pendidikan dan media massa. Dalam konteks Orde Baru, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui penindasan fisik tetapi juga melalui mekanisme normalisasi dan produksi pengetahuan yang halus dan sistematis. Rezim Orde Baru membangun legitimasinya di atas narasi bahwa mereka adalah penyelamat negara dari krisis 1965, dan narasi ini diimplementasikan melalui metode politik yang bertujuan untuk stabilitas dan kontrol persepsi masyarakat.³²

Sistem pendidikan, terutama kurikulum sejarah, adalah alat kekuasaan yang paling efektif untuk membangun rezim kebenaran Orde Baru. Sejarah tidak lagi digunakan sebagai sarana pendidikan kritis; sebaliknya, itu telah berubah menjadi keyakinan yang mendukung otoritas penguasa melalui penyeragaman cerita. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) adalah contoh nyata dari penggunaan pengetahuan sebagai alat untuk mengajar tentara dan pemerintah sentral. Menurut Foucault, ini adalah jenis kekuatan disipliner yang bertujuan untuk mengubah subjek menjadi warga negara yang setia dan tunduk pada ideologi negara. Untuk menghilangkan aspirasi politik alternatif dan menghilangkan peran

³⁰ Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi PILGUB Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 18(2), h. 191

³¹ Siregar, M. (2021). *Ibid.* H. 7

³² Kurniawan, D. A., Putri, A. D. W., & Pratama, Y. Y. (2025). Kebijakan Kontroversial Pemerintah Orde Baru di Ranah Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Perspektif Historis. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 9(1), hal. 35

masyarakat sipil dan kelompok yang dianggap bertentangan dengan pemerintah, buku teks sejarah disucikan menjadi "kebenaran magis".³³

Teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault menyediakan paradigma baru dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam studi sejarah dan politik Indonesia. Dengan menggunakan teori ini sebagai pisau bedah, penelitian historiografi terhadap literatur Indonesianis mengenai politik Orde Baru menjadi lebih tajam dalam menyingkap mekanisme kontrol persepsi dan manipulasi memori kolektif yang dilakukan oleh rezim otoriter. Analisis teoritis ini menunjukkan bahwa historiografi bukan sekadar rekaman masa lalu yang statis, melainkan sebuah proses dinamis di mana berbagai wacana saling bertarung untuk memperebutkan kedaulatan atas kebenaran.

4. Historiografi

Historiografi merupakan representasi akhir dari proses penelitian sejarah yang menyajikan fakta-fakta masa lampau dalam bentuk eksplanasi yang logis. Dalam tahap ini, peneliti dituntut untuk menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Kualitas sebuah tulisan sejarah ditentukan oleh kemampuannya dalam menyajikan fakta secara presisi, didukung oleh penguatan basis data (evidensi) yang lengkap, disusun dalam kerangka struktur yang sistematis, serta disampaikan dengan gaya bahasa yang jernih namun tetap memiliki kedalaman teoretis.

BAB I, Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Latar Belakang Ketertarikan Para Indonesianis Meneliti Persitiwa 1965, (Pada Bab ini menguraikan latar belakang ketertarikan para Indonesianis dalam mengkaji Indonesia sebagai objek diskursus).

BAB III Pandangan Indonesianis Terhadap Peristiwa 1965 (Pada Bab ini peneliti membedah karya-karya para indonesianis sebagai *counter narrative* (tandingan) legitimasi politik yang dibangun oleh Orde Baru).

³³ Mudhoffir, A. M. (2013). *Ibid*, h. 4

BAB IV, Sebagai Bab akhir, peneliti akan menyimpulkan pembahasan yang telah peneliti buat mengenai Literatur Historiografi Para Indonesianis.

